**PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KASUS
KEKERASAN MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA TAHANAN
PERANG AFGHANISTAN***(International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of
The United States Military Afghanistan)***Fikry Latukau****Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung****fikry18001@mail.unpad.ac.id****Tulisan Diterima: 27-01-2020; Direvisi: 30-04-2020; Disetujui Diterbitkan: 01-05-2020****DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.153-164>****ABSTRACT**

The US military tortured Afghan prisoners of war with interrogation techniques and violently raped prisoners of war in Afghanistan, violating international warfare law. The purpose of this study is to analyze how the enforcement of international criminal law against torture cases committed by the United States military against prisoners of war in Afghanistan. Normative juridical research methods analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. The results showed that the US military could be carried to the ICC, because of interrogation crimes using abusive techniques, torture, and the treatment of biological experiments on prisoners of war carried out in Afghanistan (state parties). It applies to perpetrators of crimes from any country, be it a state party or not. In conclusion, the US military can be carried to the ICC, because the ICC has jurisdiction over several serious crimes, including war crimes. The Suggestion that war crimes are an unforgivable thing, especially torturing prisoners of war who have rights and obligations according to the 1949 Vienna convention should the criminals who do so are immediately arrested and punished. Then it would also be possible to form a special regulation governing prisoners of war who were the object of violence.

Keywords: ICC jurisdiction; international criminal court; non-state party**ABSTRAK**

Militer Amerika Serikat melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang Afganistan dengan teknik introgasi secara kasar dan memperkosa tahanan perang di Afganistan, tentunya ini sangat melanggar ketentuan hukum yaitu ketentuan hukum humaniter internasional. Tujuan penelitian ini untuk melihat serta melakukan analisis mengenai bagaimanakah penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan militer Amerika dapat dibawa ke ICC, karena kejahatan interogasi menggunakan teknik kasar, penyiksaan, dan perlakuan eksperimen biologis pada tahanan perang yang dilakukan di wilayah Afganistan sebagai (negara pihak). Ini berlaku bagi para pelaku kejahatan dari negara mana pun, baik negara pihak atau non pihak. Kesimpulannya militer Amerika dapat diadili di ICC, dikarenakan ICC mempunyai yuridiksi terhadap beberapa kejahatan yang dianggap serius termasuk kejahatan perang. Saran dari tulisan ini bahwa kejahatan perang adalah suatu hal yang tidak dapat dimaafkan, terutama menyiksa tawanan perang yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban menurut konvensi wina III 1949, maka, seharusnya para penjahat perang yang melakukan hal ini segera ditangkap dan dihukum. Kemudian kiranya juga dapat membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan objek kekerasan.

Kata Kunci: yuridiksi ICC; pengadilan pidana internasional; negara non-pihak

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti berbagai bentuk kejahatan yang telah terjadi dan dengan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional khusus dan campuran yang kesemuanya ini hanya bersifat sementara, juga dengan mempertimbangkan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pengadilan-pengadilan sebelumnya, maka Komisi Hukum Internasional diminta mempelajari kemungkinan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional Permanen.¹

Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk ICC (*International Criminal Court*) atau Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada 15 Juni-17 Juli 1998. Pengadilan Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen atau tetap dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Pengadilan ini berkedudukan di Den Haag, Belanda. Kewenangan dari ICC sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 5, adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan genosida (*The crime of genocide*)
- b. Kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*)
- c. Kejahatan perang (*War crime*)
- d. Kejahatan agresi (*The crime of aggression*).

Statuta Roma Pasal 126 menyebutkan bahwa untuk dapat berlaku, perlu diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 60 negara. Pada 1 Juli 2002 ketentuan Pasal itu terpenuhi kemudian pada Februari-Juni 2003 telah ditetapkan hakim, penuntut umum, dan ketua panitera.² Mulai sejak itu *International Criminal Court* telah dapat melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya. Dengan ini menegaskan bahwa *International Criminal Court* memiliki norma hukum positif yang sesungguhnya dan bukan hanya sekedar norma moral (*positive morality*) yang diharapkan dapat mengikat negara-negara dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan tujuan pembentukan pengadilan ini.

Dewasa ini lebih dari 50 konflik telah berkobar di seluruh dunia. Setiap hari telah tersiar berita mengenai kekejaman dan perbuatan kejam lainnya yang dilakukan atas nama perang: perempuan, lelaki dan anak-anak dibunuh secara besar-besaran atau diusir dari rumah mereka, pasar-pasar ditembaki, tawanan disiksa atau dihukum mati secara sumir, orang perempuan diperkosa atau menjadi sasaran perbuatan yang merendahkan martabat, pemuda dan pemudi dipaksa memanggul senjata daftarnya panjang sekali.³ Beberapa orang mungkin dari mereka ini hanyalah beberapa diantara keburukan perang yang terjadi.

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan semena-mena terhadap kumpulan hukum universal yang diakui, yang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Sementara ini Hukum Humaniter Internasional telah memberi perlindungan kepada korban perang yang tak terhitung banyaknya, yang berkisar dari anggota pasukan tempur yang sakit dan terluka sampai tawanan perang penduduk sipil, masih terdapat terlalu banyak kasus yang terjadi salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan oleh tentara negara Amerika Serikat kepada tahanan perang di Afghanistan.

Militer Amerika Serikat dalam hal ini melakukan tindakan kejahatan dengan teknik kasar dan memperkosa tahanan perang di Afghanistan, tentunya ini sangat melanggar ketentuan hukum dalam hal ini ketentuan hukum humaniter internasional. Amerika Serikat melakukan invasi terhadap Afghanistan sesudah kejadian 11 September 2001 pada akhir 2001. Invasi ini didukung oleh sekutu Amerika Serikat. Yang melatarbelakangi invasi ini adalah serangan teroris internasional Al-Qaeda terhadap World Trade Organization (WTO) dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001.

Militer Amerika Serikat selama mengintevigasi Afghanistan ternyata melakukan penyiksaan terhadap tahanan perang Afghanistan. Contohnya adalah penyiksaan dengan teknik *waterboarding* yang dilakukan oleh Militer Amerika Serikat terhadap 61 tahanan perang Afghanistan yang terjadi antara 1 Mei 2003

1 Malcolm N. Shaw QC., *Hukum internasional* (Bandung: Nusa Media, 2013), 400.

2 I Made Pasek Diantha, *Hukum pidana internasional dalam dinamika pengadilan pidana internasional* (Jakarta: kencana prenada media grop, 2014), 66.

3 Naomi Putri Lestari Pomantow, "KAJIAN YURIDIS TENTARA ANAK DALAM PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER," *LEX ET SOCIETATIS* (2014): 32.

sampai dengan 31 Desember 2014.⁴ Tentu perbuatan tersebut sangat melanggar ketentuan hukum dalam hal ini ketentuan hukum humaniter internasional.

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, otomatis akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila mereka sudah tidak mampu lagi melanjutkan peperangan dan jatuh ditangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ketangan musuh berhak pula mendapat status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Konvensi III Tahun 1949 Pasal 4A.⁵

Oleh karena hal tersebut persoalan-persoalan yang dikemukakan sebelumnya sekaligus mengisyaratkan keterkaitan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afghanistan. sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai Bagaimanakah penegakkan hukum pidana internasional terhadap kasus penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afghanistan?

Tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui bahwa penegakan hukum pidana internasional terhadap *non-state parties* dapat diberlakukan kepada negara mana saja sekalipun Amerika Serikat, dan dalam upaya penanganan hak imunitas negara, agar menimbulkan efek jera, karena pada faktanya sampai sekarang untuk membawa negara *non state parties* (bukan negara pihak) statuta roma sangat minim, dengan begitu maka manfaat dari tulisan ini untuk para penegak hukum pidana internasional baik Jaksa dan para penegak hukum pada lingkup *International Criminal Court* untuk dapat merumuskan kebijakan hukum dalam perkara yang ada kaitannya dengan negara non pihak pada umumnya dan lebih khususnya dalam penegakan kejahatan perang (penyiksaan terhadap tawanan

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah hukum pidana internasional yang ditempuh saat kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, dengan melakukan analisa kasus kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan, teori dan atau prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana internasional, hukum internasional, dan hukum humaniter internasional. Yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

Lebih jelasnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶ yang berkaitan dengan Penegakan hukum internasional terhadap militer amerika yang melakukan kekerasan kepada tahanan perang afghanistan.

Sebagai suatu norma, penelitian ini bermaksud mengetahui tujuan normatif serta implementasi Penegakan hukum internasional terhadap militer Amerika yang melakukan kekerasan kepada tahanan perang Afghanistan. Sebagai suatu fakta, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimanakah penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afghanistan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.⁷ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu.⁸ Dalam konteks ini, penelitian menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bagaimanakah penegakan hukum pidana

4 Al Jazeera News And News Agencies, "ICC: US forces may have used torture in Afghanistan," last modified 2016, diakses Januari 11, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2016/11/icc-forces-torture-afghanistan-161115035831479.html>.

5 Arlina Permanasari, *Pengantar hukum humaniter* (Jakarta: Miamita Print, 1999), 164.

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: rajawali pers, 2014), 13.

7 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: rineka cipta, 2010), 37.

8 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: universitas indonesia, 1986), 10.

internasional terhadap kasus penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afghanistan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut sebagai data sekunder⁹ yang memiliki kaitan dengan penegakan hukum atas penegakkan hukum pidana internasional terhadap kasus penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afghanistan. Dalam hal ini, data sekunder mencakup:¹⁰

a. Data hukum sekunder:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti berbagai konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional (MOU), berbagai peraturan perundang-undangan internasional lainnya, dan juga berupa peraturan perundang-undangan yang tentunya terkait dengan pembahasan permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Piagam PBB 1945, Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlindungan tawanan perang, Statuta Roma 1998 Pengadilan Pidana Internasional dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain. Bahan atau sumber sekunder berupa bahan pustaka¹¹ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: RUU (Rancangan peraturan perundang-undangan), Naskah akademik, konvensi yang belum diratifikasi, hasil-hasil penelitian, hasil karya di bidang hukum, dan berupa teori atau konsep yang sudah ada. Teori yang digunakan adalah teori yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Teori ini juga berguna sebagai batu uji dalam melakukan analisis pembahasan. Selain itu juga dapat

diperoleh dari hasil penelitian yang termuat dalam media cetak ataupun digital.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan *Encyclopedia*.

b. Data primer

Selain itu digunakan juga bahan dari lapangan yang bersumber dari wawancara dengan narasumber dari pihak akademisi terkait.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data secara kualitatif yaitu analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas, penelitian data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Yurisdiksi *International Criminal Court*

Pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag-Belanda ini dibentuk melalui Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998. Meskipun sama-sama berkedudukan di Den Haag namun institusi ini tidak ada kaitannya dengan lembaga pengadilan internasional lain yang merupakan salah satu organ utama PBB yaitu *International Court of Justice/ International Criminal Court* (ICJ/ICC) atau yang lebih kita kenal dengan Mahkamah Internasional. *International Criminal Court* dibentuk bersamaan dengan dibentuknya PBB pada tahun 1945, statutenya pun melekat pada piagam PBB (*The Charter of United Nations*) dan anggarannya berdasarkan anggaran PBB. Adapun ICC adalah *independent institution*, memiliki struktur organisasi sendiri terlepas dari PBB demikian halnya dengan anggaran operasionalnya yang didasarkan atas kontribusi negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ICC adalah subyek hukum internasional yang memiliki *international personality*. Dengan demikian ICC dapat melakukan berbagai *international legal capacity* dalam rangka pelaksanaan fungsinya.¹² *International Criminal Court* dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* 12.

¹⁰ *Ibid.* 13.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan* (Jakarta: grafindo presada, 2001), 29.

¹² Pasal 4 (1) Statuta Roma 1998.

anggota juga dengan perjanjian khusus di wilayah negara lain.¹³

Kejahatan perang menurut Pasal 9 Statuta antara lain adalah pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949. Tindakan-tindakan yang dimaksud antara lain pembunuhan dengan sengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk eksperimen biologi, dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka yang serius terhadap tubuh, perusakan secara luas dan pengambilan milik yang tidak sah, memaksa tawanan perang atau orang-orang lain yang dilindungi untuk membantu kekuatan musuh, dengan sengaja menghilangkan hak-hak tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi dari peradilan yang jujur dan reguler, deportasi dan pemenjaraan yang melawan hukum serta melakukan penyanderaan.¹⁴

Praktek penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afganistan, Bensouda (Jaksa *International Criminal Court*) yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tawanan perang Afganistan, menuturkan dia punya alasan cukup kuat yang menyebutkan serdadu Amerika Serikat melakukan kejahatan perang di Afganistan. “Ada alasan masuk akal untuk meyakini, ketika menginterogasi para tahanan, militer Amerika Serikat dan Intelijen Central Intelligence Agency (CIA) melakukan kejahatan perang yaitu penyiksaan, perlakuan kejam, dan merendahkan martabat dan memperkosa”¹⁵ Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa militer Amerika Serikat telah melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang Afganistan, dan telah melanggar ketentuan yang ada baik itu ketentuan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang menyebutkan perlindungan untuk tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis (memerkosa). Dan hal ini dengan jelas dipraktekkan oleh militer Amerika Serikat. Kemudian ketentuan larangan beserta

kewenangan untuk mengadili hal ini yang diatur dalam Statuta Roma.

Berdasarkan waktunya atau temporal jurisdiction (*ratione temporis*), *International Criminal Court* hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002.¹⁶ Bilamana suatu negara menjadi pihak setelah berlakunya Statuta, maka *International Criminal Court* hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta berlaku terhadap negara tersebut. kecuali jika negara tersebut membuat deklarasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 paragraf 3 Statuta. Afganistan merupakan salah satu dari beberapa negara pihak (*state parties*) telah meratifikasi Statuta Roma, secara *de facto* praktek penyiksaan terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat kepada tawanan perang Afganistan dapat diadili di *International Criminal Court* jika praktek tersebut terjadi setelah bulan Mei 2003 karena pada saat itu Afganistan telah meratifikasi Statuta Roma. Pada bulan November, ketika jaksa *International Criminal Court* Fatou Bensouda, meminta izin pengadilan untuk memulai penyelidikan, dia mengatakan bahwa pengadilan telah menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Afghanistan sejak tahun 2006.¹⁷ Dengan demikian secara waktunya atau *jurisdiction temporal* dapat diadili di *International Criminal Court* karena Afganistan telah meratifikasi statuta roma tersebut.

Berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau *teritorial jurisdiction*, maka *International Criminal Court* dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Termasuk dalam pengertian ini adalah negara dimana kapal atau pesawat didaftarkan jika kejahatan dilakukan di atas kapal atau pesawat negara peserta. Di samping itu yurisdiksi *International Criminal Court* juga berlaku dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi *International Criminal*

¹³ Pasal 4 (2) Statuta Roma 1998.

¹⁴ Pasal 8 Statuta Roma 1998.

¹⁵ Pandasurya Wijaya, “Tentara AS diduga kuat lakukan kejahatan perang di Afganistan,” *merdeka.com*, last modified 2016, diakses Januari 30, 2020, <https://www.merdeka.com/dunia/tentara-as-diduga-kuat-lakukan-kejahatan-perang-di-afganistan.html>.

¹⁶ Pasal 11 Statuta Roma 1998.

¹⁷ Kathy Gannon (ABC News), “Masyarakat Afghanistan Ajukan 1,17 Juta Klaim Kejahatan Perang ke Pengadilan Internasional,” *matamata politik berita politik dunia*, last modified 20018, diakses Januari 25, 2020, <https://www.matamatapolitik.com/warga-afghanistan-mengajukan-117-juta-klaim-kejahatan-perang-ke-pengadilan/>.

Court berdasarkan deklarasi ad hoc.¹⁸ Dalam prakteknya militer Amerika Serikat yang dalam hal ini melakukan tindakan penyiksaan dengan praktek introgasi secara kasar kepada tawanan perang Afghanistan yang terjadi dan dilakukan pada yuridiksi teritorialnya Afghanistan sehingga kasus ini sangat dimungkinkan untuk diadili di pengadilan internasional (*international criminal court*). Dalam Statuta Roma Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa *International Criminal Court* memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang berasal dari negara yang sudah menjadi pihak dari *International Criminal Court*.¹⁹ Pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya *International Criminal Court* tidak hanya dapat mengadili individu yang berasal dari negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma (*State Parties*) serta mengakui yuridiksi *International Criminal Court*, akan tetapi semua individu termasuk yang berasal dari bukan negara pihak (*non state parties*) sepanjang kejahatan yang dilakukan terjadi di wilayah negara yang menjadi pihak dari *International Criminal Court* atau negara peratifikasi Statuta Roma.²⁰

Yuridiksi teritorial, yaitu kedaulatan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah negaranya. Salah satu wujud dari yuridiksi teritorial suatu negara adalah membuat serta memberlakukan hukum pidana nasionalnya terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayah negara tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi warga negaranya sendiri maupun orang asing yang melakukan suatu tindak pidana. Ini merupakan dasar yang diunggulkan bagi pelaksanaan yuridiksi negara. Peristiwa yang terjadi dalam batas-batas teritorial suatu negara dan orang-orang yang berada di wilayah tersebut sekalipun untuk sementara, pada lazimnya tunduk pada penerapan hukum lokal (negara yang meratifikasi Statuta Roma). Asas atau prinsip teritorial mempersoalkan tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi lebih luas dari pada tanah (bumi), ia merupakan asas yang tertua dari asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat.

Asas teritorial merupakan asas yang fundamental. Romli, dengan mengutip Bert Swart dan Andre Klip²¹ menulis bahwa asas teritorial telah diperluas tidak lagi semata-mata ditujukan terhadap tempat di mana pelaku melakukan kejahatan, melainkan juga tempat di mana akibat dari kejahatan itu dilakukan atau di mana korban berada.

Kedudukan Hukum Pidana Internasional ditinjau dari Asas Teritorial berdasarkan asas teritorial, maka setiap kejahatan yang terjadi diwilayah suatu negara, negara berhak untuk mengadili setiap kejahatan yang terjadi diwilayah teritorial. Meskipun hukum pidana nasional mempunyai kewenangan sesuai dengan yuridiksi teritorialnya atas semua peristiwa yang terjadi di wilayah kedaulatan suatu negara, tetap dikecualikan terhadap peristiwa pidana atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, *International Criminal Court* berdasarkan Statuta Roma tetap bisa menjalankan yuridiksi teritorialnya di wilayah yuridiksi negara yang berdaulat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, kedamaian dan melindungi hak-hak masyarakat internasional.

Yuridiksi kriminal berdasarkan asas teritorial adalah merupakan hak, kekuasaan, atau kewenangan suatu negara untuk membuat suatu peraturan pidana nasional legislasi, untuk dilakukan di dalam wilayahnya, dilaksanakan terhadap orang atau badan badan hukum yang ada dalam wilayahnya (eksekutif).²²

Penerapan prinsip Yuridiksi Universal, adalah penerapan yurisdiksi pidana suatu negara terhadap pelaku tanpa melihat tempat terjadinya kejahatan atau warga negara si pelaku atau korban bahkan hubungan negara tersebut dengan kejahatan yang terjadi. Prinsip ini mengesampingkan prinsip yurisdiksi teritorial dan nasionalitas yang selama ini dikenal dalam hukum pidana dan hukum internasional. Tidak semua kejahatan dapat mengakibatkan pemberlakuan prinsip yurisdiksi universal, alasan mengapa prinsip ini diberlakukan dalam perkembangan hukum pidana internasional dikarenakan adanya kejahatan yang luar biasa berbahaya bagi kepentingan

¹⁸ Pasal 12 Statuta Roma 1998.

¹⁹ Pasal 12 Ayat (2) Statuta Roma.

²⁰ Diajeng Wulan Christianti, "Jurisdiksi International Criminal Court terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* (2015): 28–29.

²¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997), 105.

²² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Cv Yrama Widya, 2005), 162.

masyarakat internasional sehingga setiap negara berkepentingan berkewajiban untuk adili pelaku.²³ Sesuai dengan perjanjian internasional yang mendasari didirikannya *International Criminal Court*. *International Criminal Court* memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang paling serius,²⁴ yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi.²⁵ Penegakan hukum terhadap kejahatan yang disebutkan sebelumnya telah diakui sebagai *ius cogens*.²⁶ Rozakis memberikan arti norma *jus cogens* sebagai suatu norma hukum internasional umum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Norma hukum internasional umum diartikan sebagai suatu norma yang diterapkan kepada sebagian besar negara-negara karena telah diterima sebagai suatu hal yang mengikat dan terhadap norma tersebut tidak boleh dilanggar.²⁷ Kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan yang serius yang disebutkan dalam Statuta Roma Pasal 5 Ayat (1) sehingga sangat memungkinkan untuk diadili di mahkamah pidana internasional (ICC) jika dikaitkan dengan prinsip ini, karena prinsip ini melihat adanya kejahatan yang luar biasa atau kejahatan yang serius.

Meskipun masih terdapat perdebatan mengenai keberlakuan prinsip universal dalam hal ruang lingkup dan definisi dari kejahatan dalam *International Criminal Court* masih terus berlanjut hingga sekarang setidaknya inti dari kejahatan tersebut merupakan pelanggaran hukum kebiasaan internasional yang memicu diberlakukannya prinsip yurisdiksi universal.²⁸ Dalam kejahatan perang tentunya ada norma yang

melarang dan memperbolehkan misalnya tidak lain dan tidak bukan adalah melindungi warga sipil dan tidak diperbolehkan untuk menyiksa tawanan perang. Kejahatan perang dan pengaturannya juga telah ada sebelumnya dan diakui masyarakat internasional sebagai kebiasaan yang harus ditaati dan di patuhi. Sehingga siapa saja yang melakukan kejahatan perang dapat dikatakan telah melanggar ketentuan kebiasaan internasional.

Penerapan prinsip yurisdiksi universal ini juga sesuai dengan tujuan pendirian *International Criminal Court*²⁹ yakni menghapuskan *impunity* terhadap pelaku kejahatan-kejahatan *International Criminal Court* yang salah satunya adalah kejahatan perang sehingga mencegah terjadinya kembali kejahatan tersebut. Apakah hal tersebut mengartikan bahwa *International Criminal Court* dapat memberlakukan yuridisnya terhadap semua negara tanpa kesepakatan dari negara yang bersangkutan? Pemberlakuan yurisdiksi universal ini terbatas bagi *International Criminal Court* sepanjang adanya persetujuan dari tempat terjadinya kejahatan, negara asal dari pelaku atau korban kejahatan tersebut.³⁰ Dari keterangan tersebut, Pengacara yang mewakili para korban konflik Afghanistan mendesak Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk membuka penyelidikan kejahatan perang yang akan mencakup penyelidikan tindakan pasukan Amerika Serikat.³¹ Dengan adanya pernyataan tersebut berarti Afganistan menyetujui para pelaku penyiksaan untuk dapat diadili di *International Criminal Court*.

B. Penegakan Hukum Pidana Internasional dikaitkan dengan *Non-State Parties*

Penegakan hukum atas kejahatan internasional, pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari negara yang bersangkutan. Negara ada kalanya dianggap tidak mau (*unwilling*), bahkan dianggap tidak mampu (*unable*) dalam

23 Marry Robinson, Dalam Diajeng Wulan Cristianti, *Yuridiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma Dan Dampaknya Terhadap Indonesia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2015, 32-33.

24 Pasal 1 Statuta Roma, 1998.

25 Pasal 5 Ayat (1) Statuta Roma.

26 Pasal 53 VCLT, Definisi *Ius Cogens*, "Adalah Norma Yang Diterima Dan Diakui Oleh Komunitas Internasional Negara Sebagai Keseluruhan Sebagai Norma Dari Mana Tidak Ada Penghinaan Diizinkan Dan Yang Dapat Dimodifikasi Hanya Dengan Norma Berikutnya Dari Hukum Internasional Umum Yang Memiliki Karakter Yang Sama".

27 Christos Rozakis, *The Concep of Jus Cogens in the Law of Treaties* (North Holland: North Holland Publishing Company, 1976), 169-170.

28 Diajeng Wulan Cristianti, Op.Cit, 33.

29 Pembukaan Pragraf 5 Statuta Roma, "Bertekad Untuk Memutuskan Rantai Kekebalan Hukum (Impunity) Bagi Para Pelaku Kejahatan Ini Dan Dengan Demikian Memberi Sumbangan Kepada Dicegahnya Kejahatan Tersebut".

30 Diajeng Wulan Cristianti, Op.Cit, 33.

31 Berlianto, "Korban Perang Afghanistan Minta ICC Investigasi Kejahatan Pasukan AS," *sindonews.com*, last modified 2019, diakses Januari 17, 2020, <https://international.sindonews.com/read/1465451/41/korban-perang-afghanistan-minta-icc-investigasi-kejahatan-pasukan-as-1575476722>.

penyelesaian kejahatan internasional. Pada umumnya bahwa negara yang dianggap tidak mau adalah negara yang pada dasarnya mampu, tetapi ada upaya untuk melindungi pelaku, penanggulangan tidak dibenarkan, dan tidak independen. Negara yang dianggap tidak mampu adalah negara yang mengalami keruntuhan sistem hukum nasionalnya baik secara penuh ataupun secara substansial. Implementasi Statuta Roma 1998 terhadap Negara Pihak, bisa atas inisiatif negara pihak, penuntut umum, dan dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan terhadap negara bukan pihak dalam Statuta Roma 1998, dapat dengan inisiatif negara yang bukan pihak dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu negara yang dianggap tidak mau (*unwilling*) dan negara yang dianggap tidak mampu (*unable*), memiliki perbedaan kriteria. Terdapat tiga kriteria yang bersifat alternatif suatu negara yang dianggap tidak mau (*unwilling*), yaitu:

- Apabila negara sedang atau telah melakukan langkah-langkah hukum, atau sudah adanya keputusan dari peradilan nasional, tetapi semata-mata dengan maksud melindungi orang yang bersangkutan dari tanggungjawabnya.
- Apabila dalam proses hukum yang sedang ditempuh, terdapat suatu penanggulangan yang tidak dibenarkan.
- Apabila dalam proses hukum yang telah atau sedang dilaksanakan, tidak secara mandiri (*independen*) atau memihak.

Kriteria suatu negara yang dianggap tidak mampu (*unable*) merupakan negara yang dalam kasus tertentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya, disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem yudisial negara tersebut secara penuh ataupun secara substansial. Implementasi Statuta Roma 1998 terhadap negara yang dianggap tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) dalam praktiknya dapat berlaku terhadap negara Pihak Statuta Roma 1998 dan bukan negara pihak Statuta Roma 1998 terhadap negara pihak dapat menggunakan tiga mekanisme, yaitu berdasarkan inisiatif negara pihak, dewan keamanan dan penuntut umum, sedangkan untuk negara bukan Pihak, dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu atas inisiatif negara bukan pihak dan dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan Statuta Roma 1998 *International*

Criminal Court memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari bukan negara pihak (*non state parties*) dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada *International Criminal Court*.
- Dalam kasus warga negara dari *non state parties* melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi *International Criminal Court* berkaitan dengan kejahatan tersebut.
- Dalam kasus negara yang bukan pihak (*non state parties*) sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu³²

Setidaknya ada satu negara *non state parties* yaitu Amerika Serikat yang mengajukan keberatan terhadap kondisi pertama dan kedua sebagaimana dipaparkan di atas yang mengabaikan persetujuan *non state parties*.

Dalam perlawanan atau serangannya terhadap *International Criminal Court*, Amerika melakukan berbagai upaya, baik melalui jalur politik maupun hukum agar supaya *International Criminal Court* tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warganya. Upaya-upaya atau strategi yang dilakukan Amerika Serikat antara lain sebagai berikut:

- Membuat peraturan dan perjanjian untuk membatasi yurisdiksi *International Criminal Court* dengan negara-negara pihak dalam Statuta Roma.
- Membuat perjanjian dengan negara-negara lain yang melarang mentransfer warga Amerika Serikat ke *International Criminal Court*.
- Mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan untuk mencegah pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap warga negara dari *non state parties* yang terlibat dalam operasi-operasi perdamaian PBB.

Menurut Amerika Serikat pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC)

32 D. Akande, "The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits," *Journal of International Criminal Justice* (2003): 1.

terhadap warga dari *non state parties* bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Prinsip hukum yang dimaksud antara lain adalah *Pacta tertiis nec nosunt nec prosunt* (bahwa perjanjian yg menimbulkan hak dan membebaskan kewajiban bagi para pihak yang berjanji tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga). Prinsip yang berasal dari Romawi ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan telah dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian internasional. Menurut prinsip yang tertuang dalam Konvensi Wina 1969 Pasal 34 ini suatu perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuannya. Menanggapi keberatan yang di ajukan Amerika ini, M. Scharf mengemukakan bahwa sebenarnya tidak ada satu pasal pun dalam Statuta Roma yang membebani kewajiban pada pihak ketiga.³³ Yang terjadi adalah bahwa dengan pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court* tersebut akan mempengaruhi kepentingan *non state parties*. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan membebani atau menciptakan suatu kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969. Pelanggaran hukum internasional kedua oleh *International Criminal Court* terhadap *non state parties* menurut Madeline Morris³⁴ adalah bahwa *International Criminal Court* akan bertindak secara tidak sah jika melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara dari *non state parties* yang sedang melaksanakan tugas resmi atau *policy* dari negaranya. Lebih lanjut Morris juga mengemukakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap warga negara dari *non state parties* akan bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan.³⁵

Menanggapi hal tersebut diatas, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diajeng Wulan Cristianti,³⁶ dalam artikelnya dengan judul “Yuridiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma Dan Dampaknya terhadap Indonesia” menyatakan bahwa kewenangan *International Criminal Court* untuk mengadili *non state parties* Statuta Roma tidak bertentangan dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (VCLT). Dan apa yang oleh Amerika Serikat bahwa pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap warga dari *non state parties* bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, dianggap keliru, seperti yang telah penulis bahas sebelumnya.

Kemudian menanggapi apa yang dikemukakan Morris, para pakar-pakar hukum internasional mengemukakan bahwa negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan negara pihak (*non state parties*). Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori *international crime* maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Manakala suatu negara yang memiliki yurisdiksi berkehendak melaksanakan yurisdiksinya maka persetujuan dari negara asal pelaku kejahatan tidaklah disyaratkan.

Kewenangan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan yang masuk kategori ruang lingkup yurisdiksinya merupakan pendelegasian dari negara pihak yang di wilayahnya terjadi kejahatan internasional dan negara tersebut tidak mampu atau tidak mau mengadili sendiri untuk kemudian menyerahkan pelaku untuk diadili di depan *International Criminal Court*. Dengan demikian bahwa *International Criminal Court* dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap anggota pasukan PBB yang berasal dari *non state parties* tidaklah melanggar hukum internasional. Dalam praktek hukum internasional ketika suatu negara akan mengekstradisikan pelaku kejahatan ke

33 M. Scharf, Hlm. 67, Bandingkan Dengan: D. Arnaut, “When In Rome, The International Criminal Court And The Avenues For U.S. Participation” Dalam 43 *virginia Journal Of International Law* (Vjil) (2003) Hlm 405 Juga Johnson. “The American Servicemember’s Protection Act: Protecting Whom?” Dalam 43 *Virginia Journal Of International Law* (Vjil), (2003). 444.

34 Madeline Morris, “High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States,” *Law and Contemporary Problems* (2001): 135.

35 ICJ Reports, *Italy v. France, United Kingdom and United States*, 90 (1995).

36 Dosen Hukum Internasional Universitas Padjadjaran Bandung., Sekaligus Dosen Hukum Pidana Internasional.

negara yang memintanya tidaklah disyaratkan adanya persetujuan dari negara asal si pelaku terlebih dahulu.

Beberapa contoh seperti konvensi menentang terorisme adalah contoh-contoh perjanjian yang dikatakan melahirkan prinsip universal. Secara umum konvensi-konvensi tersebut menetapkan bahwa semua negara yang di wilayahnya terdapat teroris berkewajiban untuk mengadili atau mengekstradisikannya ke negara lain yang bersedia mengadilinya. Amerika sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi anti terorisme Amerika banyak melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelaku yang diduga teroris yang berasal dari non pihak konvensi anti terorisme.

Satu argumen lagi yang dapat diajukan untuk mendukung yurisdiksi *International Criminal Court* atas warga *non state party* adalah bahwa Statuta Roma 1998 Pasal 27 mengatur tentang tidak relevannya jabatan resmi menetapkan sebagai berikut:

1. Statuta berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang kepala negara atau pemerintahan anggota suatu pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah statuta. Demikian pula dalam hal mengenai dirinya sendiri tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.
2. Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang baik di bawah hukum nasional atau internasional tidak menghalangi mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut. Pasal di atas tidak membedakan antara imunitas personal dengan bahan kekebalan imunitas (*immunity ratione material*).

Sebaliknya Pasal 27 Statuta Roma 1998 merekomendasikan bahwa pejabat negara akan bertanggungjawab terhadap segala tindakan yang dilakukannya atas nama negara, pejabat negara di sini termasuk pejabat yang menikmati personal imunitas.

Dari Pasal-Pasal yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu negara bukan

negara peserta Statuta Roma namun *International Criminal Court* dapat memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara tersebut bilamana kejahatan dilakukan di wilayah negara peserta Statuta dan negara tersebut menyerahkan kasus itu pada *International Criminal Court*. Di samping negara peserta, *International Criminal Court* juga dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan dalam rangka Bab VII Piagam Dewan Keamanan. Dan jika mengura pada Pasal 34 piagam PBB dinyatakan bahwa dewan keamanan berhak untuk menginvestigasi semua kasus antar negara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Adapun pada Pasal 1 piagam PBB tujuan dan prinsip PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional.³⁷

Cela untuk membawa Militer Amerika ke *International Criminal Court* berdasarkan pemaparan sebelumnya adalah, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyebut militer Amerika Serikat (AS) diduga melakukan kejahatan perang di Afghanistan (berdasarkan locus), pada tahun 2003-2004 (berdasarkan tempus). Militer Amerika Serikat menyiksa para tahanan di Afghanistan dalam praktik yang disebut jaksa *International Criminal Court* (ICC) sebagai kebijakan yang disengaja. Dalam hal ini kejahatan terjadi di wilayah Afganistan secara otomatis hukum Afganistan yang berlaku, Afganistan yang kita ketahui bersama telah meratifikasi statuta roma oleh karena itu perkara ini secara sah dapat dibawa ke Internasional Criminal Court (ICC).

KESIMPULAN

Nampaknya pelaksanaan penegakan hukum pidana internasional terhadap militer Amerika Serikat oleh Mahkamah Pidana Internasional belum berjalan dengan semestinya dikarenakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam hal politik luar negerinya serta upaya hukum yang diupayakannya sehingga pelaksanaan penegakan hukum tersebut agak terkendala dalam pelaksanaanya.

Mahkamah pidana internasional memiliki yuridiksi terhadap beberapa kejahatan yang

37 Pasal 1 Tujuan Dan Prinsip PBB, "Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Internasional, Dan Untuk Itu: Untuk Mengambil Tindakan Bersama Yang Efektif Untuk Pencegahan".

dianggap serius dan salah satunya adalah kejahatan perang yang dalam hal ini dilakukan oleh militer Amerika Serikat kepada para tawanan perang Afghanistan di wilayah teritorial Afghanistan sehingga mahkamah pidana internasional dapat mengadili tindakan kejahatan tersebut yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat.

Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non state parties* dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada *International Criminal Court* (ICC), dan dalam kasus warga negara dari *non state parties* melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) berkaitan dengan kejahatan tersebut. Serta dalam kasus negara *non state parties* sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu, negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya.

Dari keterangan tersebut berarti cukup jelas bahwa militer Amerika Serikat dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag Belanda, dikarenakan tindakan kejahatan interogasi dengan teknik kasar, penyiksaan serta perlakuan eksperimen biologi kepada para tawanan perang dilakukan pada wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi mahkamah pidana internasional (ICC). Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (*non state parties*). Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori *international crime* maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan

SARAN

Bahwa sesungguhnya kejahatan perang adalah suatu hal yang tidak dapat dimaafkan, terutama menyiksa tawanan perang yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban

Wina III 1949, dan bila menyerang warga sipil. Maka, seharusnya para penjahat perang yang melakukan hal ini segera ditangkap dan dihukum dengan aturan yang ada dan berlaku sesuai dengan yang telah diperbuat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap setiap orang maupun negara, Sehingga negara *non state parties* yang mempunyai imunitas atau kekebalan sekalipun juga dapat diadili di mahkamah pidana internasional (ICC), dan berdampak pada negara lain baik *state parties*, maupun *non state parties* sehingga tidak melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan pemidanaan di Mahkamah Pidana Internasional dapat dijalankan dengan efektif.

Kiranya juga dapat membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan objek kekerasan, karena tawanan perang dipandang “tidak memiliki kekuatan” untuk menolak paksaan negara penahan untuk dijadikan dan diperlakukan secara kasar dan diperbudakkan yang dapat mengakibatkan kecacatan tubuh, atau bahkan kematian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dihaturkan kepada kedua orang tua Penulis yang sungguh luar biasa yaitu kedua orang Tuaku tercinta Mama Mujuna Latukau, BA, dan Aba Drs. Sophian Latukau yang sudah membesarkan, memberikan kasih sayang, bimbingan, nasihat, semangat, dorongan, motivasi, dan biaya yang tiada terhingga untuk menempuh pendidikan magister Program Hukum Universitas Padjadjaran Bandung saat ini. Terimah Kasih atas doa yang tiada henti-hentinya mengiringi langkah Penulis dalam menuntut ilmu.

Kepada para Akademisi/Dosen pada Program Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya yang tinggi sehingga Penulis dapat melakukan penelitian ini dan berjalan dengan baik, lebih khusus kepada tim dosen pengajar pada mata kuliah Hukum Pidana Internasional terima kasih banyak, berkat mengikuti kelas tersebut penelitian ini bisa ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Akande, D. “The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits.” *Journal of*

International Criminal Justice (2003).

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997.

Berlianto. "Korban Perang Afghanistan Minta ICC Investigasi Kejahatan Pasukan AS." *sindonews.com*. Last modified 2019. Diakses Januari 17, 2020. <https://international.sindonews.com/read/1465451/41/korban-perang-afghanistan-minta-icc-investigasi-kejahatan-pasukan-as-1575476722>.

Christianti, Diajeng Wulan. "Jurisdiksi International Criminal Court terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* (2015).

Diantha, I Made Pasek. *Hukum pidana internasional dalam dinamika pengadilan pidana internasional*. Jakarta: kencana prenatal media grop, 2014.

ICJ Reports. *Italy v. France, United Kingdom and United States* (1995).

Al Jazeera News And News Agencies. "ICC: US forces may have used torture in Afghanistan." Last modified 2016. Diakses Januari 11, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2016/11/icc-forces-torture-afghanistan-161115035831479.html>.

Morris, Madeline. "High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States." *Law and Contemporary Problems* (2001).

News), Kathy Gannon (ABC. "Masyarakat Afghanistan Ajukan 1,17 Juta Klaim Kejahatan Perang ke Pengadilan Internasional." *matamata politik berita politik dunia*. Last modified 20018. Diakses Januari 25, 2020. <https://www.matamatapolitik.com/warga-afghanistan-mengajukan-117-juta-klaim-kejahatan-perang-ke-pengadilan/>.

Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Cv Yrama Widya, 2005.

Permanasari, Arlina. *Pengantar hukum humaniter*. Jakarta: Miamita Print, 1999.

Pomantow, Naomi Putri Lestari. "KAJIAN YURIDIS TENTARA ANAK DALAM

PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER." *LEX ET SOCIETATIS* (2014).

QC., Malcolm N. Shaw. *Hukum internasional*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Rozakis, Christos. *The Concep of Jus Cogens in the Law of Treaties*. North Holland: North Holland Publishing Company, 1976.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: universitas indonesia, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan*. Jakarta: grafindo presada, 2001.

———. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: rajawali pers, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: rineka cipta, 2010.

Wijaya, Pandasurya. "Tentara AS diduga kuat lakukan kejahatan perang di Afganistan." *merdeka.com*. Last modified 2016. Diakses Januari 30, 2020. <https://www.merdeka.com/dunia/tentara-as-diduga-kuat-lakukan-kejahatan-perang-di-afganistan.html>.

. M. Scharf, bandingkan dengan: D. Arnaut, " 'When in Rome...The International Criminal Court and the Avenues for U.S. Participation' dalam 43Virginia Journal of International Law (VJIL) (2003) juga Johnson. 'The Ameri-can Servicemember's Protection Act: Protecting Whom?' dalam.43 Virginia Journal of International Law (VJIL), (2003).

Charter of the United Nations 1945.

Geneva III Convention of 1949 concerning the protection of prisoners of war.

Statute Of Rome 1998 International Criminal Court.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.